



MODEL KADERISASI ORGANISASI KEMAHASISWAAN EKSTRA KAMPUS UNTUK PENGUATAN *CIVIC SKILLS* GENERASI MUDA

M. Azrul Marsaoly¹⁾, Wahyudin Noe^{2)*}, Irwan Djumat³⁾, Abd. Firman Bunta⁴⁾

¹²³Universitas Khairun

⁴Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: wahyudinnoe@unkhair.ac.id

ABSTRAK

Menurunnya partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan ekstra kampus mencerminkan pergeseran orientasi generasi muda yang cenderung memprioritaskan efisiensi studi di atas keterlibatan organisasional. Kecenderungan ini mengabaikan potensi besar organisasi kemahasiswaan sebagai arena pembentukan karakter, kepemimpinan, dan internalisasi keterampilan kewargaan (*civic skills*). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi ekstra kampus yang secara konsisten mempertahankan fungsi kaderisasi sebagai mekanisme sistematis dalam pembinaan kompetensi kewargaan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis model kaderisasi HMI Cabang Ternate sebagai instrumen penguatan *civic skills* mahasiswa. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dinamika dan struktur kaderisasi secara mendalam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model kaderisasi HMI Cabang Ternate terstruktur secara berjenjang melalui dua tahapan utama, yaitu tahap pengenalan organisasi, serta tahap pembentukan dan pengembangan kader. Tahap pengenalan dijalankan melalui strategi rekrutmen langsung maupun tidak langsung guna membangun kesadaran dan ketertarikan mahasiswa terhadap nilai-nilai organisasi. Tahap pembentukan dan pengembangan mencakup internalisasi nilai keislaman, keindonesiaan, dan kepemimpinan yang diperkuat melalui jalur kaderisasi formal, seperti *Basic Training* dan *Intermediate Training*. Pengembangan kapasitas kader selanjutnya dilaksanakan melalui kegiatan *follow up*, *up-grading*, *senior course*, kajian rutin, forum diskusi, pelatihan menulis, aksi sosial, pengabdian masyarakat, serta aktivitas advokasi. Keseluruhan model kaderisasi tersebut terbukti berkontribusi signifikan terhadap penguatan *civic skills* mahasiswa, yang termanifestasi dalam peningkatan kapasitas berpikir kritis, kecakapan komunikasi dan kolaborasi, serta kompetensi kepemimpinan.

Kata Kunci: Kaderisasi; Civic Skills; HMI; Organisasi Kemahasiswaan; Kepemimpinan Mahasiswa

ABSTRACT

orientation of the younger generation, who tend to prioritize study efficiency over organizational involvement. This tendency ignores the significant potential of student organizations as arenas for character development, leadership development, and the internalization of civic skills. The Islamic Students Association (HMI) is one such extra-campus organization that consistently maintains its cadre formation function as a systematic mechanism for fostering students' civic competencies. This study aims to analyze the cadre formation model of the HMI Ternate Branch as an instrument for strengthening students' civic skills. A qualitative approach using a case study method was used to explore the dynamics and structure of cadre formation in depth. The research findings reveal that the HMI Ternate Branch's cadre formation model is structured in stages through two main stages: organizational introduction and cadre formation and development. The introduction stage is implemented through direct and indirect recruitment strategies to build student awareness and interest in the organization's values. The formation and development stage includes internalization of Islamic values, Indonesian values, and leadership, which are strengthened through formal cadre formation pathways, such as Basic Training and Intermediate Training. Further cadre capacity development is



carried out through follow-up activities, upgrading, senior courses, regular studies, discussion forums, writing training, social action, community service, and advocacy activities. The overall cadre development model has been proven to contribute significantly to strengthening students' civic skills, manifested in increased critical thinking capacity, communication and collaboration skills, and leadership competencies.

Keywords: *Cadre Development; Civic Skills; HMI; Student Organization; Student Leadership*

PENDAHULUAN

Organisasi hadir sebagai sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar, memiliki batasan ruang lingkup yang jelas, serta disepakati untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur peran dan mekanisme kerja dalam organisasi memungkinkan integrasi fungsi antarindividu dalam satu kesatuan yang relatif stabil. Secara konseptual, organisasi dipahami sebagai kesatuan sosial yang terdiri atas individu yang berinteraksi menurut pola tertentu dengan fungsi yang terdistribusi. Pola interaksi tersebut membentuk struktur kelembagaan yang menopang keberlanjutan organisasi. Secara empiris, organisasi berkembang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pemerintahan, keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, politik, dan kemahasiswaan. Setiap jenis organisasi memiliki orientasi normatif dan tujuan strategis sesuai konteks pembentukannya (Fithriyyah, 2021).

Organisasi kemahasiswaan merupakan arena pengembangan kapasitas mahasiswa yang bersifat ekstra kurikuler. Partisipasi dalam organisasi memberi pengalaman peningkatan kemampuan berbicara, keterampilan memecahkan masalah, kecakapan komunikasi, serta keterlibatan dalam ruang sosial. Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai medium pembentukan kemandirian dan kedewasaan sebelum mahasiswa menjalankan peran sosial di masyarakat. Secara umum, organisasi kemahasiswaan terbagi menjadi organisasi intra universitas dan organisasi ekstra kampus. Organisasi intra kampus memiliki relasi administratif dan otoritatif dengan pengelola perguruan tinggi, sedangkan organisasi ekstra kampus memiliki orientasi ideologis dengan jaringan dan struktur yang terintegrasi secara nasional (Muniruddin, 2022).

Organisasi kemahasiswaan dalam perspektif pendidikan dapat diposisikan sebagai institusi pendidikan nonformal yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan kapasitas mahasiswa. Pengembangan kapasitas tersebut berlangsung melalui proses kaderisasi yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan sebagai mekanisme utama transformasi organisasi. Kaderisasi pada hakikatnya merupakan proses transmisi nilai antargenerasi yang mencakup dimensi nilai universal maupun nilai partikular organisasi. Kaderisasi merupakan upaya sistematis dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan peran dan fungsi organisasi secara optimal. Proses tersebut mengintegrasikan pembelajaran kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, serta penguatan kapasitas intelektual sebagai satu kesatuan yang kohesif dalam pembentukan kader yang kompeten dan berkarakter (Nurtanto & Munandar, 2021).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang menempatkan kaderisasi sebagai orientasi utama Gerakan. Sebagai organisasi kader, HMI mengembangkan potensi anggotanya melalui pembinaan terstruktur yang berorientasi pada pembentukan integritas moral dan kapasitas intelektual. Penekanan kaderisasi HMI terletak pada pembentukan watak dan kepribadian berbasis kesadaran keagamaan, pengembangan kemampuan ilmiah, serta penguatan keterampilan praksis dalam



menerjemahkan gagasan ke dalam Tindakan (Alfian, 2013). Bentuk kaderisasi HMI meliputi latihan kader sebagai kegiatan formal, aktivitas forum internal dan eksternal organisasi, serta pembinaan informal dalam praktik kehidupan sehari-hari kader (Nurtanto & Munandar, 2021).

Dalam kajian pendidikan kewarganegaraan, keberadaan mahasiswa dipandang sebagai subjek aktif warga negara yang secara intelektual memiliki tanggung jawab sosial terhadap kebijakan publik, sehingga penguasaan keterampilan kewarganegaraan menjadi keniscayaan. Keterampilan tersebut mencakup kemampuan mengartikulasikan hak dan kewajiban secara kritis dan konstruktif dalam ruang publik sebagai wujud partisipasi warga negara yang baik. Ubaidillah dan Rozak (2012) mendefinisikan keterampilan kewarganegaraan sebagai kecakapan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik sekaligus kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara, yang pada konteks mahasiswa terwujud dalam kapasitas menganalisis dan mengkritisi kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional (Ubaedillah & Rozak, 2012). Lebih lanjut, Sumantri dan Winataputra (Somantri & Winataputra, 2017) memperluas cakupan tersebut dengan menegaskan bahwa keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan membahas persoalan sosial secara bertanggung jawab, membangun kerja sama berbasis toleransi, serta berpartisipasi secara cerdas dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat luas..

Sejumlah penelitian terdahulu menempatkan organisasi mahasiswa dalam perspektif gerakan sosial, dinamika politik kampus, atau pembentukan kepemimpinan, sehingga analisis terhadap pola kaderisasi sebagai mekanisme sistematis pembentukan keterampilan kewarganegaraan belum memperoleh perhatian yang memadai, terutama pada konteks organisasi mahasiswa ekstra kampus di tingkat cabang/daerah (Fadli, 2025; Hidayah et al., 2022a; Shobahiya et al., 2025; Shofiyullah, 2022). Dalam realitas empiris di Kota Ternate, masih ditemukan persepsi mahasiswa yang memandang keterlibatan organisasi sebagai hambatan terhadap masa studi dan kurang relevan dengan pengembangan kompetensi akademik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif organisasi sebagai ruang pendidikan nonformal dan pengalaman subjektif sebagian mahasiswa.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pola kaderisasi yang diterapkan HMI Cabang Ternate dan bagaimana dampaknya terhadap penguatan keterampilan kewarganegaraan mahasiswa. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dalam memperkaya kajian pendidikan kewarganegaraan pada ranah nonformal melalui analisis organisasi mahasiswa ekstra kampus sebagai arena pembentukan *civic skills*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model kaderisasi yang berorientasi pada pembentukan mahasiswa sebagai warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang berlangsung secara alamiah dalam konteks organisasi kemahasiswaan. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek serta perilaku yang dapat diamati (Creswell & Creswell, 2017). Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara mendalam pola kaderisasi yang diterapkan HMI Cabang Ternate serta dampaknya terhadap penguatan *civic skills* mahasiswa. Metode studi kasus digunakan untuk memusatkan analisis pada satu unit kasus tertentu, yakni HMI Cabang Ternate, sebagai representasi fenomena yang diteliti. Studi kasus bertujuan untuk



memahami suatu peristiwa atau fenomena secara mendalam melalui eksplorasi kasus yang spesifik dan kontekstual (Maxwell, 2013). Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika kaderisasi, termasuk tahapan, strategi, dan aktivitas yang dilakukan dalam proses pembentukan kader. Penelitian dilaksanakan di lingkungan HMI Cabang Ternate sebagai lokus utama penelitian. Sumber data primer penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas organisasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Wawancara dilakukan dengan memastikan fokus dan konsistensi data yang diperoleh. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama terkait kapasitas, pengalaman, dan pengetahuan mereka terhadap proses kaderisasi yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi Pengurus Cabang, Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL), alumni, serta pengurus komisariat di lingkungan HMI Cabang Ternate. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan telaah literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk dokumen organisasi dan referensi ilmiah. Kombinasi berbagai sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperkuat validitas temuan serta menghasilkan analisis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola kaderisasi HMI cabang Ternate dalam Penguatan Ketrampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa HMI Cabang Ternate sebagai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus memiliki peran signifikan dalam penguatan dan pengembangan civic skills mahasiswa melalui sistem kaderisasi yang terstruktur. Sistem kaderisasi tersebut bersifat komprehensif, mencakup mekanisme rekrutmen calon kader hingga seluruh aktivitas organisasi yang berorientasi pada pengembangan kapasitas diri anggota. Kaderisasi HMI Cabang Ternate diselenggarakan dalam tiga jalur yang saling melengkapi, yakni kaderisasi formal melalui pelatihan terstruktur, kaderisasi informal melalui interaksi dan budaya organisasi, serta kaderisasi nonformal melalui berbagai aktivitas pengembangan di luar mekanisme pelatihan resmi.

Pola kaderisasi tersebut disusun dan dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan organisasi dan semangat pengembangan kualitas pengetahuan dan kemampuan diri atau *soft skills*. Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kepada anggota/mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pemberian materi dan kajian-kajian yang berkenaan dengan HMI maupun ilmu pengetahuan yang ingin dipelajari. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai organisasi perkaderan, HMI Cabang Ternate menitikberatkan perhatiannya pada aspek pemberdayaan anggota dan mahasiswa pada umumnya melalui kegiatan kaderisasi, baik secara formal, informal maupun nonformal. Proses atau bentuk kaderisasi HMI Cabang Ternate dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pengenalan, serta tahap pembentukan dan pengembangan (PB HMI, 2023).

Tahap Pengenalan

Tahap ini merupakan proses rekrutmen sekaligus pengenalan atau sosialisasi organisasi dalam rangka merekrut mahasiswa atau calon kader. Pengenalan tersebut menggunakan dua skema; pertama secara langsung (*face to face*), yaitu proses pengenalan atau upaya perekrutan calon anggota dengan cara melakukan sosialisasi dan menjelaskan tentang HMI secara langsung dan persuasif. Proses ini dalam rangka mempublikasi organisasi serta meyakinkan



calon anggota untuk mau bergabung dan menempa diri di HMI. Metode perekrutan ini biasanya dilakukan di kelas perkuliahan, melalui kegiatan literasi/lapak baca, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan kader lainnya di lingkungan kampus. Tahap pengenalan ini lebih sering dijumpai melalui pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan. kedua secara tidak langsung, dalam proses ini media pendukung digunakan sebagai instrumen perekrutan, diantaranya menggunakan *platform* media sosial maupun papan informasi di lingkungan kampus seperti: membuat pamflet dengan ucapan selamat datang kepada mahasiswa baru, pemasangan brosur di madding, dan menyebarkan informasi tentang rekrutmen anggota baru melalui media sosial seperti *facebook* maupun *instagram*.

Tahapan pengenalan juga dilakukan melalui proses seleksi kader (*screening test*), tahapan ini merupakan proses untuk menjaring calon kader yang potensial dengan melakukan prosesi tes menggunakan metode wawancara. Bentuk kaderisasi ini bersifat selektif, dilakukan sebelum dilaksanakan latihan kader I. Biasanya dalam pelaksanaan proses kaderisasi ini dibentuk beberapa pos atau tempat calon kader untuk melakukan *screening test*, dengan setiap posnya diisi oleh tim seleksi yang telah ditentukan oleh pengurus atau *stering commitee*. Di setiap pos masing-masing dengan pertanyaan yang berkaitan dengan keHMIan, keislaman, keindonesiaan, kepemimpinan, keorganisasian dan perguruan tinggi. Seleksi/*screening* ini berfungsi untuk menguji, membentuk mentalitas, menggali lebih dalam pengetahuan calon kader, serta menggali motivasi dan potensi calon kader.

Tahap Pembentukan dan Pengembangan

Fase pembentukan dan pengembangan memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Fase ini berkaitan dengan tiga aspek, yaitu pembentukan watak dan kepribadian (*afeksi*), penguatan pengetahuan (*kognisi*), dan keahlian (*psikomotorik*). Pada fase pembentukan dan pengembangan, HMI Cabang Ternate dalam pelaksanaannya mencakup aktivitas perkaderan formal, training nonformal dan perkaderan informal.

1. Latihan Kader

Latihan kader merupakan proses untuk membentuk kepribadian kader. Latihan kader termasuk dalam perkaderan formal. Training formal ini dilakukan secara sistematis dan berjenjang. Secara umum latihan kader yang dilakukan di lingkungan HMI ditingkat cabang yang juga membawahi komisariat adalah latihan kader II dan latihan kader I. Latihan kader I (LK I) adalah latihan dasar bagi calon kader HMI untuk mendapatkan status keanggotaan. Latihan kader I dilaksanakan ditingkat komisariat. Fokus utama latihan kader I adalah pembentukan kesadaran dan penanaman nilai atau ideologisasi organisasi kepada kader agar pola pikir, sikap, dan perilaku sesuai dengan kepribadian kader yang diharapkan. Dalam latihan kader I penekanannya pada aspek afektif. Biasanya latihan kader I dilaksanakan selama 3-4 hari dengan diberikan 5 materi wajib HMI yang terdiri dari Sejarah Peradaban Islam dan HMI, Konstitusi, Mission, Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi (KMO), dan berbagai materi tambahan seperti sejarah gerakan mahasiswa, pengantar ideologi serta materi yang berkaitan dengan bidang keilmuan masing-masing komisariat ditingkat fakultas.

Latihan kader II dilaksanakan oleh pengurus cabang. Latihan kader II fokus utamanya adalah pemberian materi yang sifatnya pendalaman dan pengayaan serta keahlian dalam mengelola organisasi. Latihan kader II penekanannya lebih pada aspek kognitif dan motorik secara berimbang. Untuk mengikuti latihan kader II salah satu syaratnya dimulai dengan membuat sebuah karya tulis dalam bentuk jurnal maupun makalah dengan tema yang sudah



ditentukan oleh panitia pelaksana ditingkat cabang diberbagai daerah. Tujuan dari latihan kader II adalah terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual untuk memetakan peradaban dan memformulasikan gagasan dalam lingkup organisasi. Target dari latihan kader II ini adalah (1), memiliki kesadaran intelektual yang kritis, dinamis, progresif, dan inovatif dalam memperjuangkan misi organisasi, (2), memiliki pengetahuan tentang peta peradaban dunia, (3), memiliki kemampuan manajerial dalam organisasi.

2. Follow Up

Kegiatan ini dilakukan setelah calon kader telah selesai mengikuti latihan kader I. *Follow Up* merupakan tindak lanjut dari training yang sebelumnya diikuti oleh kader. Pola kaderisasi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memantapkan pemahaman kader mengenai HMI setelah LK I. Biasanya pemahaman lima materi wajib HMI yang diprioritaskan, yaitu Sejarah Peradaban Islam dan HMI, Konstitusi HMI, *Mission*, Kepemimpinan Manajemen Organisasi (KMO), dan Nilai Dasar Perjuangan (NDP). Pemateri yang diundang dalam kegiatan *follow up* adalah kader-kader yang telah menyelesaikan latihan instruktur atau senior course sesuai dengan sindikat atau pengajuan karya tulis tentang lima materi wajib HMI saat mengikuti proses latihan instruktur maupun senior yang dianggap memiliki kemampuan dalam menyampaikan lima materi wajib. Kegiatan ini juga biasanya tidak hanya kader-kader baru, tetapi kader lama pun seringkali turut diikutsertakan dalam forum untuk mendalami materi yang telah diketahui.

3. Senior Course (Latihan Instruktur)

Senior course merupakan bentuk pelatihan yang dikhususkan untuk kader yang akan melakukan pengabdian mengajar di internal HMI. *Senior course* atau latihan instruktur adalah pola perkaderan yang ditujukan untuk anggota HMI dalam rangka membentuk kemampuan mengajar atau mengelola forum training dan menyampaikan materi. *Senior course* ini bertujuan agar terbentuknya pengelola latihan yang memiliki kualitas insan cita, serta mampu menjadi teladan yang baik. Biasanya setiap kader yang telah menyelesaikan pelatihan ini akan menjadi instruktur sehingga bisa menjadi *master of training* dalam latihan kader I, latihan kader II, dan *training* informal.

4. Upgrading

Upgrading merupakan suatu proses perkaderan untuk pengembangan nalar dan pemikiran kritis bagi kader. Kegiatan *upgrading* terdiri dari *upgrading* kepengurusan, *upgrading* kepemimpinan dan manajemen organisasi dan *upgrading* lima materi wajib. Di lingkup HMI Cabang Ternate biasanya *upgrading* kepengurusan diselenggarakan setelah pelatihan dan pengambilan sumpah pengurus, baik ditingkat cabang maupun komisariat. *Upgrading* kepengurusan dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan *soft skills* dan meningkatkan pemahaman kader dalam berorganisasi. Selain itu, biasanya *upgrading* juga dilakukan ketika kader hendak mengikuti jenjang training yang lebih tinggi seperti latihan kader II. Biasanya *upgrading* ini dilakukan agar setiap kader yang mengikuti jenjang *training* latihan kader II sudah memiliki pengetahuan yang maksimal sebelum masuk ke forum *training*.

5. Aktifitas Kader

Aktifitas kader merupakan salah satu bentuk kaderisasi informal. Aktifitas yang dimaksud adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh kader dalam rangka membentuk dan mengembangkan kemampuan diri. Beberapa aktifitas atau kegiatan yang dilakukan adalah (1), kajian mingguan, (2), pengabdian masyarakat, (3), demonstrasi (4), kelas menulis, serta (5), diskusi dan dialog. Berbagai aktifitas yang dilakukan adalah untuk meningkatkan cara berfikir



yang lebih kritis, kepedulian sosial, keterampilan menulis, dan membangun kerja sama membahas serta membijaki masalah-masalah yang terjadi

Dampak Proses Kaderisasi HMI Cabang Ternate dalam Penguatan Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Temuan penelitian ini menempatkan organisasi kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate institusi pembentukan warga negara yang aktif dan kritis. Ketiga dimensi *civic skills* yang teridentifikasi, yaitu berpikir kritis, kemampuan kerjasama, dan kemampuan memimpin. Dimensi ini merupakan *core values* dari *civic competence*, di mana penekanan terhadap kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan publik demokratis. Relevansi temuan ini diperkuat oleh sejumlah studi mutakhir yang menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan arena pembentukan identitas dan kompetensi kewarganegaraan yang tidak dapat digantikan oleh proses perkuliahan formal semata (Hidayah et al., 2022b; Nastiti, 2023)

Berpikir Kritis sebagai Praktik Deliberasi Demokratis

Temuan mengenai berpikir kritis di kalangan anggota HMI Cabang Ternate relevan dibaca melalui perspektif deliberasi demokratis, gagasan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan warga yang mampu terlibat dalam diskursus publik secara rasional dan reflektif. Ruang-ruang deliberatif yang teridentifikasi dalam penelitian ini, seperti musyawarah besar, forum diskusi, dan penyelesaian konflik internal, secara struktural mencerminkan apa yang disebut sebagai *deliberative space*: arena di mana argumen dinilai berdasarkan kualitas penalaran, bukan hierarki kekuasaan (Bunta & Djumat, 2025)

Bailin & Battersby (Bailin & Battersby, 2016) menegaskan bahwa berpikir kritis yang fungsional dalam kehidupan demokrasi mensyaratkan kemampuan mengevaluasi klaim publik, menguji validitas bukti, dan membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Tiga kapasitas yang tampak terbentuk melalui keterlibatan anggota HMI Cabang Ternate dalam isu-isu kebijakan publik dan gerakan sosial di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan argumen Dewi & Maa (Dewi & Maâ, 2023) yang menemukan bahwa mahasiswa yang aktif dalam forum diskusi organisasi menunjukkan skor berpikir kritis yang secara signifikan lebih tinggi dibanding mahasiswa yang tidak berorganisasi, khususnya pada dimensi evaluasi argumen dan refleksi diri.

Kerjasama sebagai Konstruksi Modal Sosial Kewarganegaraan

Kemampuan kerjasama yang ditemukan perlu dibaca melampaui pengertian teknis *teamwork* semata. Wahono (2024) membedakan antara kerjasama berbasis solidaritas internal (*bonding*) dan kerjasama lintas-kelompok (*bridging*) dan argumentasi mereka menegaskan bahwa justru kerjasama jenis kedua yang secara langsung membentuk modal sosial kewarganegaraan (Wahono, 2024). Kerjasama HMI Cabang Ternate dengan KPU, koalisi organisasi ekstra kampus, dan kelompok pemuda lain secara empiris mencerminkan terbentuknya *bridging social capital* yang merupakan prasyarat bagi masyarakat sipil yang kuat.

Kemampuan kerjasama ini merupakan ekspresi dari disposisi kewarganegaraan demokratis yang sejatinya melampaui keterampilan interpersonal. Warga negara yang demokratis harus sanggup membangun konsensus, menegosiasikan perbedaan, dan bertindak secara kolektif melampaui batas kelompok. Milatina (Milatina et al., 2025) dalam studi mereka terhadap organisasi mahasiswa di Pekalongan menemukan bahwa keterlibatan dalam kegiatan lintas-



organisasi seperti yang dipraktikkan HMI Cabang Ternate melalui deklarasi pemilu damai bersama KPU dan BAWASLU yang secara signifikan meningkatkan kapasitas negosiasi dan toleransi politik mahasiswa. Ini sejalan dengan perspektif bahwa kerjasama merupakan komponen esensial dari *civic skills* yang tidak dapat diajarkan secara deduktif di ruang kelas (Vina Yulia Anhar et al., 2025)

Kepemimpinan sebagai Ekspresi Civic Agency

Dimensi kepemimpinan yang ditemukan dalam penelitian ini meresonansi dengan konsep *civic agency*, yakni kemampuan individu untuk mengambil inisiatif, menggerakkan orang lain, dan memproduksi perubahan sosial yang bermakna. Keterlibatan anggota HMI dalam posisi strategis, baik sebagai ketua, sekretaris, maupun koordinator kepanitiaan, bukan sekadar pelatihan manajemen melainkan proses internalisasi tanggung jawab publik.

Yolanda dkk (2024) menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan menyediakan ruang pengembangan soft skill yang tidak diajarkan khusus di ruang akademik, mencakup kepemimpinan, pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, komunikasi, kreativitas, dan kepercayaan diri (Yolanda et al., 2024). Pandangan ini diperkuat oleh Frensry (Fendry, 2025) yang menemukan bahwa mahasiswa yang pernah memegang jabatan struktural di organisasi kemahasiswaan menunjukkan tingkat *political self-efficacy* yang lebih tinggi, yakni keyakinan bahwa dirinya mampu mempengaruhi keputusan publik dibanding mahasiswa yang tidak pernah berorganisasi. *Political self-efficacy* ini merupakan prediktor kuat bagi partisipasi politik aktif jangka panjang, termasuk dalam pemilihan umum dan advokasi kebijakan.

Organisasi Kemahasiswaan sebagai Sekolah Demokrasi

Secara keseluruhan, ketiga dimensi *civic skills* yang ditemukan membentuk satu kesatuan kompetensi kewargaan yang koheren. Berpikir kritis menyediakan kapasitas epistemis; kerjasama membangun kapasitas relasional; kepemimpinan mengaktualisasikan kapasitas transformatif. Ketiganya, secara kolektif membentuk profil warga negara yang berkeadilan (*justice-oriented citizen*), yaitu warga negara yang tidak sekadar mematuhi norma, tetapi mampu menganalisis ketimpangan struktural dan bertindak untuk memperbaikinya (Manik et al., 2024)

HMI Cabang Ternate berfungsi sebagai laboratorium kewargaan (*school of democracy*) dalam jalur non-formal bagi mahasiswa di mana generasi muda belajar mengelola perbedaan, membangun konsensus, dan mengembangkan tanggung jawab publik melalui praktik langsung yang bukan sekadar transmisi pengetahuan normatif di ruang kelas (Taqiuddin et al., 2023). Di tengah krisis partisipasi demokrasi dan melemahnya apatisisme politik di kalangan generasi muda, temuan ini menegaskan perlunya institusionalisasi pengalaman berorganisasi sebagai komponen integral pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa HMI Cabang Ternate menjalankan fungsi strategis sebagai institusi pendidikan nonformal yang secara sistematis membentuk kompetensi kewargaan mahasiswa dalam sistem kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang. Sistem kaderisasi tersebut dirancang secara komprehensif dalam dua tahapan utama, yakni tahap pengenalan, serta tahap pembentukan dan pengembangan kader, yang masing-masing memiliki mekanisme, target, dan orientasi pedagogis yang distingtif. Tahap pengenalan berfungsi sebagai langkah awal transformasi identitas mahasiswa, di mana rekrutmen dijalankan dalam



skema langsung maupun tidak langsung, disertai seleksi berbasis wawancara yang menguji dimensi intelektual, ideologis, dan motivasional calon kader. Tahap pembentukan dan pengembangan mencakup spektrum aktivitas yang luas, mulai dari kaderisasi formal berupa *Basic Training* dan *Intermediate Training*, kaderisasi nonformal yang meliputi *follow up*, *upgrading*, dan *senior course*, hingga kaderisasi informal yang terwujud dalam kajian mingguan, kelas menulis, diskusi, demonstrasi, dan pengabdian masyarakat. Keseluruhan rangkaian aktivitas tersebut mengintegrasikan dimensi afektif, kognitif, dan psikomotorik sebagai satu kesatuan proses pembentukan kader yang utuh.

Dampak sistem kaderisasi ini termanifestasi dalam penguatan tiga dimensi *civic skills* yang terintegrasi. Pertama, kapasitas berpikir kritis yang berkembang dalam keterlibatan aktif pada forum deliberatif internal organisasi maupun respons terhadap isu kebijakan publik di tingkat lokal dan nasional. Kedua, kemampuan kerja sama yang melampaui solidaritas internal, mencakup pembentukan *bridging social capital* berbasis kolaborasi lintas organisasi dan keterlibatan dalam agenda publik bersama institusi lainnya seperti KPU dan BAWASLU. Ketiga, kompetensi kepemimpinan yang terinternalisasi dari pengalaman memegang tanggung jawab struktural, yang pada akhirnya membentuk *political self-efficacy* sebagai prediktor partisipasi demokratis jangka panjang. Ketiga dimensi *civic skills* tersebut secara kolektif membentuk profil warga negara yang berkeadilan, yakni individu yang mampu menganalisis ketimpangan struktural dan mengambil tindakan transformatif. Dalam konteks ini, HMI Cabang Ternate berperan sebagai laboratorium kewargaan yang menyediakan ruang praktik demokrasi secara autentik di luar perkuliahan formal.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pendidikan tinggi, khususnya perlunya institusionalisasi pengalaman berorganisasi sebagai komponen integral pendidikan kewarganegaraan. Perguruan tinggi perlu mengakui dan mengintegrasikan peran organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dalam kerangka kurikulum kewargaan yang lebih holistik, mengingat kontribusinya terbukti signifikan dalam membentuk generasi muda yang kritis, kolaboratif, dan berjiwa kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A. (2013). *HMI, 1963-1966: Menegakkan Pancasila di tengah prahara*. Buku Kompas.
- Bailin, S., & Battersby, M. (2016). *Reason in the balance: An inquiry approach to critical thinking*. Hackett Publishing.
- Bunta, A. F., & Djumat, I. (2025). Meninjau Kembali Pemikiran Nurcholish Madjid: Neo-Republikanisme Islam dan Kewargaan Demokratis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(2), 474-485.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. Sage publications.
- Dewi, M., & Maâ, M. (2023). Pengaruh Keaktifan Berorganisasi dan Kemampuan Berpikir Kritis terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi PAI di Universitas PGRI Wiranegara. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 8(2), 52-66.
- Fadli, M. (2025). Phenomenon Of Educational Culture And Cadre Training Of Islamic Students Association Fis Unimed Branch HMI Deli Serdang. *Edelweiss: Journal Of Innovation In Educational Research*, 2(4), 1-6.



- Fendry, E. (2025). *Pengaruh Pengalaman Organisasi, Pengalaman Magang, dan Self Efficacy Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Tingkat Akhir* (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung).
- Fithriyyah, M. U. (2021). *Dasar-dasar teori organisasi*.
- Hidayah, Y., Fen, C. S., Suryaningsih, A., & Mazid, S. (2022a). Promoting student participation skills through student organizations. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 213–223.
- Hidayah, Y., Fen, C. S., Suryaningsih, A., & Mazid, S. (2022b). Promoting student participation skills through student organizations. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 213–223.
- Manik, T. S. M., Purwantiningsih, A., & Riyanti, D. (2024). Konstruksi Ideal Warga Negara Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu Tinjauan Literatur. *Integralistik*, 35(1).
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach: An interactive approach*. sage.
- Milatina, Z., Aulia, N., Nabila, A., Khorina, A., & Masrur, M. (2025). Peran generasi muda sebagai pelopor toleransi dalam program moderasi beragama: Kajian literatur di Kota Pekalongan. *Journal Sains Student Research*, 3(6), 1193–1204.
- Muniruddin, S. (2022). *Bintang Arasy*. Syiah Kuala University Press.
- Nastiti, D. (2023). Peran organisasi mahasiswa dalam pembentukan sikap demokratis. Prima Magistra. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(1), 64–76.
- Nurtanto, A., & Munandar, A. (2021). Pola Kaderisasi Organisasi Ekstra Kampus: Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP UIN Syarif Hidayatullah. *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 42–47.
- PB HMI. (2023). *Hasil-Hasil Kongres Himpunan Mahasiswa Islam XXXIII*.
- Shobahiya, M., Rahmawati, P., Tamami, F. Q., Muchtar, Z. I., & Ahmadi, M. A. (2025). Beyond The Circle: The Spread of Imm Cadres Across Student Organizations in Muhammadiyah Universities. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(1), 249–259.
- Shofiyullah, M. (2022). *Peran organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang Buleleng Dalam Meningkatkan Rasa Nasionalisme Dan Patriotisme Mahasiswa Muslim Di Kabupaten Buleleng*.
- Somantri, M. N., & Winataputra, U. S. (2017). *Disiplin pendidikan kewarganegaraan: Kultur akademis dan pedagogis*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Taqiuddin, H. U., Mulianah, B., & Solatiyah, B. (2023). Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pembelajaran nilai-nilai demokrasi pancasila. *Jurnal Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)*, 5(1), 37–43.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Prenadamedia*.
- Vina Yulia Anhar, S., Novaria Maulina, S. I., Fauzie Rahman, S., & Ranindy Qadrinnisa, S. (2025). *Mahasiswa Berdaya, Organisasi Berkarya: Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Organisasi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wahono, M. (2024). *Modal sosial santri sebagai warga negara muda untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi*.



Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman

Print-ISSN 2355-4622 Online-ISSN 2622-9021

Vol. 13, No. 1, Juni 2026, halaman 59-69

<https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>

Yolanda, S., Sari, S. M., & Ismail, I. (2024). Peran organisasi mahasiswa dalam membangun karakter kepemimpinan dan peningkatan soft skill. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(04), 361-373.